

ABSTRAK**KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI****Oleh:****ERRY SURYA BUANA, S.H.****031141074**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan “*Conceptual, statute and historical approach*”. Melalui pendekatan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kedudukan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan di lingkup Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi.

Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara mendalam mengenai Kedudukan Peraturan Menteri dalam lingkup penyelenggaraan pemerintah provinsi. Permasalahan muncul ketika terjadi peralihan dari era sebelum otonomi daerah ke era otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kantor Wilayah yang berarti merupakan Instansi Vertikal dari Pusat termasuk Departemen (Kementerian), kini beralih menjadi instansi yang terlepas dari Pusat, sehingga harus tunduk pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal norma hukum dan daya ikatnya, sehingga diarahkan pada pembahasan yaitu terkait karakteristik peraturan menteri dan *legal standing* dari peraturan menteri terhadap kewenangan Gubernur.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik peraturan menteri bersifat regeling. Sedangkan *legal standing* dari Peraturan Menteri terhadap kewenangan Gubernur yaitu sebagai pedoman dalam rangka menyeragamkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan dan gubernur melakukan kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan.

Kata Kunci : Peraturan Menteri, Wewenang dan Otonomi Daerah.

ABSTRACT

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

By:

ERRY SURYA BUANA, S.H.

031141074

This research is a normative law with a " Conceptual , statute and historical approach". Using the approach in this study conducted a critical assessment of the Status of the implementation of the Regulation of the Minister of Local Government , especially in the scope of the Provincial Government.

This research is oriented towards reviewing in depth about the Status of Regulation within the scope of the implementation of the provincial government . Problems arise when the transition from the era before the era of regional autonomy to regional autonomy. Regional work units previously serves as the Regional Office which means a vertical institutions including the Center Department (Ministry), now turning to agencies that regardless of the Center , so it should be subject to the Governor as Deputy Central Government . Regulation of the Minister issued as legal uncertainty, including in terms of legal norms and binding power, so the discussion is directed at the relevant characteristics of the ministerial regulations and the legal standing of the regulatory authority of the minister to the Governor.

The results of this study stated that the characteristics are Regeling ministerial regulations or arrangements which are general and abstract and acknowledged . While the legal standing of the Regulation of the Minister of the authority of the governor that as a guide in order to unify the implementation of regional autonomy in Indonesia as a unitary state and Governor authority in the from of guidance and supervision.

Keywords: Ministerial Regulation, Authority and regional autonomy.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur yang tiada terkiranya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Minat Studi Hukum Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak ada sebuah keistimewaan dari sebuah ilmu, jika tidak bisa membuat perubahan dan penyempurnaan dihadapan realitas. Hari ini kita masih melihat bahwa hukum Indonesia masih butuh perbaikan dan penyempurnaan. Begitu halnya karya tulis (Tesis) ini, penulis merasa terlalu jauh untuk menjadi jawaban atas problematika yang ihasapi hukum kita hari ini.

Penyusunan Tesis dengan judul “KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI” dapat diselesaikan berkat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. SUKARDI, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini. Kemudahan penulis ini dalam menemui dan meminta pembimbingan beliau merupakan factor utama selesainya penyusunan tesis ini. Semoga Allah swt selalu melindungi beliau.

Atas tersusunnya tesis ini , penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, seperti :

1. Bapak Prof. Dr. Fasich, Apt, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini melalui fasilitas yang memadai seperti perpustakaan. Kelengkapan koleksi buku maupun koleksi tesis dan disertasi di perpustakaan Kampus B Unair, membuat penulis dengan mudah menemukan bahan hukum yang dibutuhkan.
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini melalui kelengkapan fasilitas yang dimiliki Fakultas Hukum Universitas Airlangga seperti Koleksi Khusus dan Law Book Store tempat penulis mencari dan menemukan bahan hukum.

3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., sebagai ketua program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menyediakan sistem pendidikan dan kurikulum perkuliahan yang sangat berkualitas serta berkenan menyetujui judul proposal tesis yang diajukan penulis.
4. Ibu Zandy Wulan Ayu W. P., S.H., LL.M., selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis yang telah berkenan membimbing penulisan dalam penyusunan Bab II Tesis ini.
5. Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum, selaku dosen Penguji Tesis ini. Yang telah bersedia menguji dan membimbing tesis hingga akhir.
6. Yang sangat terpelajar dan terhormat Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.H., serta para pengajar di Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagikan ilmunya.
7. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Agus Puji Walujo dan Ibunda Sunarsih terimakasih yang sangat mendalam atas semua cita dan kasih sayangnya dalam memberikan motivasi dan menjadi inspirasiku.
8. Untuk istri dan anak-anak yang ku sayangi dan kucintai. Istriku Istana Wapresina yang telah bersama sama menempuh kuliah S2 bersama sama denganku dan kedua buah hatiku Arsy Fajar Putra dan Muhammad Fathir Haziz yang menjadi sumber penyemangatku.
9. Saudara-saudaraku, Ervita Mega Sari dan Arya Winu Murti yang selalu bersemangat.
10. Untuk semua teman-teman dibangku kuliah Program Studi Pemerintahan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih banyak atas semua bantuan yang diberikan kepada saya.

Demikian ucapan terimakasih dan serta penghargaan setinggi-tingginya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal sesuai dengan amal dan

perbuatan masing-masing, namun kembali penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih terapat banyak kekurangan dan kelemahan, namun sebagian manusia biasa tidak luput dari kehilafan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pembaca sekalian.

Surabaya, Januari 2015

ERRY SURYA BUANA, S.H.

031141074

